

Determinants of Poverty in The Provinces of Sumatra Island

Hana Fitria Ramadhani¹, Muhammad Rachmad R², Erni Achmad³

¹Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

²Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

³Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Corresponding author email: hanacpnasy@gmail.com

Abstract—Introduction/Main Objectives: This study aims to analyze the determinants of poverty in the provinces of Sumatra for the period 2015–2024, focusing on the Human Development Index (HDI), unemployment rate, Provincial Minimum Wage (PMW), and economic growth, as well as formulating poverty alleviation strategies. The study is motivated by the persistent disparity in poverty levels among provinces, indicating uneven economic development. **Background Problems:** Poverty disparities across provinces in Sumatra indicate that economic development outcomes are not evenly distributed, despite the region's significant contribution to the national economy. **Research Methods:** This study uses secondary panel data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The analysis employs panel data regression with the Random Effect Model (REM) and is complemented by Revealed Comparative Advantage (RCA) analysis for strategy formulation. **Finding/Results:** The results show that partially, the Human Development Index (HDI) has negative and significant effect on poverty, while the unemployment rate has a positive and significant effect. Meanwhile, the Provincial Minimum Wage (PMW) and economic growth do not significantly affect poverty, as indicated by probability values greater than 0.05. **Conclusion:** This study finds that poverty in Sumatra is primarily determined by human capital quality and labor market conditions. Human Development Index (HDI) has a significant negative effect on poverty, while unemployment has a significant positive effect. In contrast, economic growth and the provincial minimum wage (UMP) are not statistically significant, indicating that economic growth remains non-inclusive and does not directly reduce poverty.

Keywords: Economic Growth¹; Human Development Index²; Minimum wage³; Poverty⁴; Unemployment⁵

Abstrak—Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kemiskinan pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera periode 2015-2024, dengan fokus pada Indeks Pembangunan manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Pertumbuhan Ekonomi serta merumuskan strategi pengentasan kemiskinan. **Latar Belakang Masalah:** Ketimpangan tingkat kemiskinan antar provinsi yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari badan Pusat statistik (BPS) dan kementerian keuangan. Metode Analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan (REM) dan strategi pengentasan menggunakan RCA. **Temuan/Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, variable IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, UMP dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas variable lebih besar dari 0,05. Namun secara simultan seluruh variable independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Sumatera. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Pulau Sumatera lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan kondisi ketenagakerjaan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dan UMP tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum inklusif dan belum mampu menurunkan kemiskinan secara langsung. Oleh karena itu, penguatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja menjadi kunci utama pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatera.

Kata kunci: Kemiskinan¹; IPM²; Pengangguran³; Upah Minimum⁴; Pertumbuhan ekonomi⁵

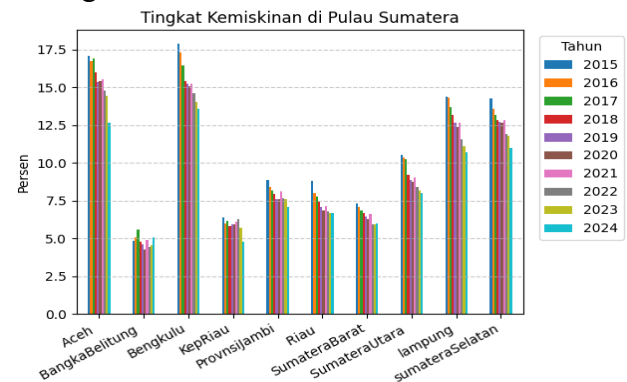
1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan ekonomi yang hingga saat ini masih menjadi fokus utama pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tingkat kemiskinan tidak hanya mencerminkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menggambarkan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak. Kemiskinan merupakan permasalahan yang besar, yang membutuhkan penanganan yang serius, karna kemiskinan bukan hanya permasalahan individu, golongan atau pemerintah saja, tetapi merupakan permasalahan yang menyeluruh (Arliansyah et al., 2024) Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika kemiskinan di Indonesia cenderung berfluktuasi sebagai konsekuensi dari guncangan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Pandemi tersebut telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, serta penurunan daya beli masyarakat. Meskipun pemulihan ekonomi mulai berlangsung pada periode pascapandemi, penurunan tingkat kemiskinan belum sepenuhnya merata antarwilayah. Temuan ini didukung oleh (Ginting, 2021) yang mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia melalui penurunan aktivitas ekonomi dan meningkatnya tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor siklus ekonomi, tetapi juga oleh faktor struktural yang lebih kompleks.

Pulau Sumatera merupakan salah satu kawasan yang tingkat kemiskinannya masih tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari rata-rata tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera yang mencapai 10,6%, lebih tinggi dibandingkan Pulau Jawa sebesar 8,8%. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera sebesar 0,327 justru lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa yang sebesar 0,393. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan utama di Pulau Sumatera terletak pada belum meratanya pembangunan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. (Mustika et al., 2023).

Walaupun secara keseluruhan terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi, disparitas antarwilayah masih cukup mencolok. Beberapa

daerah seperti Aceh dan Bengkulu tetap memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi, sedangkan wilayah seperti Kepulauan Riau dan Bangka Belitung menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan antarprovinsi yang dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat perkembangan industrialisasi di masing-masing daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Tingkat kemiskinan di pulau Sumatera Tahun 2015-2024

Berdasarkan Gambar 1, dapat diamati bahwa tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera cenderung mengalami penurunan selama periode pengamatan, meskipun masih diwarnai oleh fluktuasi serta adanya disparitas antarprovinsi. Penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan, karena masih terdapat sejumlah daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik tiap wilayah. Permasalahan kemiskinan di Pulau Sumatera juga menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor ekonomi dan sosial yang saling memengaruhi. Perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan serta variasi karakteristik daerah, baik dari aspek kualitas sumber daya manusia, kondisi pasar tenaga kerja, maupun kebijakan ekonomi yang diterapkan. Dengan demikian, persoalan kemiskinan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan analisis yang lebih mendalam..

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena penurunan angka kemiskinan yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan

kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi meskipun beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya efektif dan belum mampu mengatasi permasalahan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi Pulau Sumatera, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Kajian ini mencakup analisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, sekaligus menyusun strategi yang relevan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Purwanti, 2024) menganalisis profil kemiskinan di Indonesia dan menemukan bahwa kemiskinan masih didominasi oleh faktor struktural, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial yang bersifat multidimensional. Selain itu, penelitian oleh (Arliansyah et al., 2024) meneliti strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia dan menemukan bahwa kebijakan yang efektif harus dilakukan secara terpadu, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta kebijakan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Walaupun telah banyak penelitian yang membahas kemiskinan, sebagian besar masih menitikberatkan pada skala nasional sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi yang lebih spesifik di Pulau Sumatera. Di samping itu, berbagai hasil studi sebelumnya menunjukkan perbedaan temuan antarvariabel, yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor penentu kemiskinan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap wilayah. Berdasarkan hal tersebut, unsur

kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis yang secara khusus diarahkan pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dengan menggunakan pendekatan data panel selama periode 2015–2024. Penelitian ini juga menggabungkan beberapa variabel utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi ke dalam satu model analisis yang terpadu. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, tetapi juga menghubungkan temuan tersebut dengan penyusunan strategi pengentasan kemiskinan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

2. TINJAUAN LITERATUR

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan diukur berdasarkan nilai konsumsi dalam rupiah, khususnya dari sisi kebutuhan makanan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Standar kecukupan kalori ini digunakan sebagai acuan umum bagi seluruh kelompok penduduk, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, berat badan, maupun kondisi fisiologis. Ukuran tersebut dikenal sebagai garis kemiskinan, di mana individu dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial yang saling berinteraksi dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik juga memungkinkan penduduk yang miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat hal terpenting dari mereka ialah tenaga mereka. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat dari pengurangan jumlah penduduk miskin (Yuvanda et al., 2025).

Kemiskinan juga menghambat mereka untuk mengkonsumsi nutrisi bergizi dan dengan rendahnya tingkat pengetahuan yang mereka miliki, mereka kurang bisa memelihara lingkungan yang menyehatkan. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang

berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang didapat mereka peroleh (Banito et al., 2021).

Dalam perspektif teoritis, kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh (Nurkse, 1953). Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi akibat adanya siklus yang saling memperkuat antara rendahnya pendapatan, rendahnya tabungan, terbatasnya investasi, serta rendahnya produktivitas. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sulit keluar dari kemiskinan karena tidak adanya dorongan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Selain itu, dalam pendekatan pembangunan manusia yang dikemukakan oleh (Sen, 1999), kemiskinan dipandang sebagai keterbatasan kemampuan (*capability deprivation*) individu dalam mengakses peluang hidup yang layak. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. IPM tidak hanya mencerminkan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut (Todaro & Smith, 2014), peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup juga meningkat, sehingga tingkat kemiskinan dapat menurun.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM sering dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan yang memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Artinya, semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka kualitas hidup masyarakat cenderung semakin baik dan tingkat kemiskinan diharapkan semakin rendah. (Saragih et al., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian empiris

menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara konsisten berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli mampu memperkuat kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan (Wardani et al., 2023)

2. Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Tingkat Kemiskinan

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Dalam perspektif teori Keynesian, pengangguran muncul akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingginya angka pengangguran menyebabkan sebagian masyarakat tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga berkontribusi pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, secara teoritis pengangguran memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, tingginya pengangguran juga mencerminkan bahwa pemanfaatan sumber daya manusia belum berjalan secara optimal. Ketika individu tidak memiliki pekerjaan, maka daya beli masyarakat akan menurun, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kesejahteraan dan meningkatnya risiko kemiskinan (Mankiw, 2018)

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah pengangguran akan diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk miskin, karena masyarakat kehilangan sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan dasar (Anggraini et al., 2023). Selain itu, tingginya pengangguran juga dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya ketimpangan pendapatan dan menurunnya kualitas hidup, yang pada akhirnya memperbesar tingkat kemiskinan. Namun demikian, pada beberapa kondisi tertentu, pengangguran tidak selalu berdampak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat sumber pendapatan alternatif, seperti sektor informal atau dukungan dari program bantuan sosial pemerintah, yang mampu menahan peningkatan kemiskinan meskipun tingkat pengangguran relatif tinggi (Imanto et al., 2020).

3. Hubungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Tingkat Kemiskinan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang ditetapkan untuk menjamin pendapatan minimum bagi pekerja agar mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Dalam teori ekonomi tenaga kerja, kenaikan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan pekerja. Peningkatan pendapatan tersebut akan mendorong naiknya daya beli masyarakat, sehingga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi lebih baik dan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Secara teoritis, UMP memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan karena berperan dalam meningkatkan pendapatan, terutama bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah. Namun demikian, dalam pandangan teori neoklasik, peningkatan upah minimum yang terlalu tinggi dapat menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu mendorong perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menekan biaya produksi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Penetapan upah minimum bertujuan melindungi pekerja dengan pendapatan rendah, namun dalam praktiknya seringkali hanya berdampak signifikan pada pekerja formal, sementara pekerja sektor informal kurang merasakan manfaatnya. Hal ini menimbulkan fenomena di mana kenaikan upah minimum tidak otomatis mengurangi ketimpangan, bahkan berpotensi memperbesarnya (Wulandari et al., 2025). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi tidak selalu berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian dari sektor usaha, seperti pengurangan tenaga kerja, pengurangan jam kerja, atau peralihan pekerja ke sektor informal guna menekan biaya produksi. Akibatnya, manfaat dari kenaikan upah minimum tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya pekerja yang kehilangan pekerjaan atau tidak terserap di sektor formal. Kondisi ini justru dapat meningkatkan kerentanan ekonomi dan berpotensi mempertahankan tingkat kemiskinan pada level tertentu (Qonita, 2020).

4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. Secara umum, pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup juga akan meningkat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan mengakibatkan trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan (Nurafni et al., 2021)

Dalam perspektif teori trickle-down effect, pertumbuhan ekonomi diyakini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan (Todaro & Smith, 2014).

Meskipun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Dalam sejumlah kondisi, manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menyebabkan hasil pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat berpendapatan rendah belum merasakan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, struktur ekonomi daerah turut menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi efektif dalam mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan yang lebih terkonsentrasi pada sektor padat modal umumnya memiliki kemampuan terbatas dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan menjadi kurang optimal.

3. METODE

3.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi instansi pemerintah terkait. Penggunaan data sekunder didasarkan pada ketersediaan informasi yang

sesuai dengan variabel penelitian, meliputi tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP), serta pertumbuhan ekonomi. Data tersebut diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis secara berkala setiap tahun, serta dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel, yaitu gabungan antara data time series dan cross section, yang mencerminkan kondisi ekonomi seluruh provinsi di Pulau Sumatera selama periode pengamatan. Penggunaan data panel memberikan keunggulan dalam analisis karena mampu menangkap variasi antarwilayah sekaligus perubahan dari waktu ke waktu secara bersamaan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam.

3.2 Model Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, yaitu teknik yang mengombinasikan data runtut waktu (*time series*) dengan data antarwilayah (*cross section*). Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan estimasi yang lebih efisien serta memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai karakteristik masing-masing provinsi. Dalam analisis data panel, terdapat tiga model utama yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Penentuan model yang paling sesuai dilakukan melalui beberapa tahap pengujian, yaitu uji Chow untuk membandingkan CEM dengan FEM, uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM, serta uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model terbaik antara CEM dan REM.

Model regresi data panel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TKMK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 TKPE_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \beta_4 PE_{it} + e_{it}$$

Dimana :

- TKMK : Tingkat Kemiskinan
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien Regresi
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- TKPE : Tingkat Pengangguran
- UMP : Upah Minimum Provinsi
- PE : Pertumbuhan Ekonomi

- I : Menunjukkan Provinsi
- t : Menunjukkan Deret Waktu dari 2015-2024
- e : *Error*

Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih mendalam mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Selain itu, penggunaan data panel juga mampu mengungkap perbedaan karakteristik antarprovinsi serta dinamika perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Setelah diperoleh hasil estimasi melalui regresi data panel, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi awal pengentasan kemiskinan berdasarkan temuan empiris yang diperoleh. Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan *Root Cause Analysis (RCA)*, yang bertujuan untuk memperdalam analisis dengan mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang menjadi penyebab munculnya kemiskinan di masing-masing provinsi di Pulau Sumatera.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Pulau Sumatera, maka digunakan analisis regresi data panel.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross section F	72.748989	(9,86)	0.0000
Cross section Chi-square	10.987086	9	0.0000

Sumber : Output Eviews 12 (diolah)

Dari hasil estimasi tersebut telah ditemukan Prob. 0.0000 < 0,05. Maka Fixed Effect Model (FEM) lebih baik daripada model CEM.

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq-Statistic	Chi-Sq.d.f	Prob
Cross-section random	2.317333	4	0.6776

Sumber: Output Eviews 12 (diolah)

Dari hasil estimasi tersebut telah ditemukan Prob. 0.6776 > 0,05. Maka diartikan bahwasanya model REM lebih baik daripada model FEM maka dilanjutkan uji LM.

Tabel 3. Uji Langrage Multiplier

	Cross Section	Time	Both
Breusch-Pagan	395.3694	2.514543	397.8839
	(0.0000)	(0.1128)	(0.0000)

Sumber : Output Eviews 12 (diolah)

Dari hasil estimasi tersebut memperlihatkan bahwasanya nilai Breush-pagan 0.0000 < 0,05. Maka dapat diartikan bahwasanya model REM yang terbaik.

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menggunakan Random Effect Model (REM), diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41.74009...	4.9393227...	8.4505700...	3.35318...
IPM?	-0.47303...	0.0762512...	-6.203642...	1.43011...
TKPE?	0.227372...	0.0666489...	3.4114891...	0.00095...
UMP?	2.925529...	0.0360130...	0.9636090...	0.33768...
PE?	0.038003...	0.0280245...	1.3560868...	0.17828...
Random Effects (Cross)				
ACEH--C	5.178233...			
BABEL--C	-4.94006...			
BENGKULU--C	6.149647...			
JAMBI--C	-1.80912...			
KEPRI--C	-2.82673...			
LAMPUNG--C	2.250245...			
RIAU--C	-2.18298...			
SUMBAR--C	-3.21580...			
SUMSEL--C	2.303098...			
SUMUT--C	-0.90648...			

Sumber : Output Eviews 12 (diolah)

Dari hasil estimasi tersebut, maka dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$TKKM_{it} = 41.74009 - 0.004730IPM_{it} + 0.227372TKPE_{it} + 0.000000293UMP_{it} + 0.038004PE_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai konstanta sebesar **41.74009**. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran (TKPE), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE)

dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Pulau Sumatera sebesar **41.74009**.

Koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar -0,47303 menunjukkan bahwa setiap peningkatan IPM sebesar 1 poin akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,47303 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Koefisien variabel tingkat pengangguran sebesar 0,22737 menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1 persen akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,22737 persen, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai probabilitas sebesar 0,00095 < 0,05, sehingga tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Koefisien variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 2,92553 menunjukkan bahwa setiap kenaikan UMP sebesar 1 satuan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 2,92553 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Namun, nilai probabilitas sebesar 0,33768 > 0,05, sehingga UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,03800 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,03800 persen. Akan tetapi, nilai probabilitas sebesar 0,17828 > 0,05, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil estimasi akhir menunjukkan bahwa setiap provinsi di pulau Sumatera memiliki karakteristik tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Perbedaan dapat dilihat dengan adanya faktor Struktural.

Tabel 5. Hasil Uji t

Variable	t-hitung	Prob.	Ket
IPM	-6.203642	0.0000	Signifikan
TKPE	3.411489	0.0010	Signifikan
UMP	0.963609	0.3377	Tidak Signifikan
PE	1.356087	0.1783	Tidak Signifikan

Sumber : Output Eviews 12 (diolah)

Berdasarkan hasil uji t, variabel IPM dan tingkat pengangguran (TKPE) memiliki nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,0000 dan 0,0010, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Sementara itu, variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,3377 dan 0,1783, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 6. Hasil Uji F

F-Statistik	Prob.(F-Statistik)
63.19160	0.000000

Sumber : Output Eviews 12 (diolah)

Berdasarkan hasil estimasi model *Random effect Model (REM)*, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar $0.000000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa variable Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Sumatera.

Tabel 7. Hasil Regresi REM

R-square	0.726828
Adjusted R-square	0.715326

Sumber : Output Eviews 12 (diolah)

Dari Hasil output eviews dihasilkan koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.715326. Hal ini mengindikasikan bahwasanya senilai 0.715326 persen variabel Tingkat kemiskinan ditentukan oleh variable Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Provinsi dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 29 persen lainnya dijelaskan oleh variable diluar penelitian.

Hasil normalisasi dan perhitungan nilai preferensi menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, yang dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor seperti permasalahan struktural, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta belum meratanya hasil pembangunan ekonomi. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat menempati posisi dengan tingkat kemiskinan terendah, yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang relatif baik, struktur ekonomi yang lebih beragam, kuatnya nilai sosial budaya, serta kondisi pasar tenaga kerja yang cenderung stabil.

Secara Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran berperan paling dominan dalam menekan angka kemiskinan di pulau Sumatera.

4.2 PEMBAHASAN

A. Pagaruh Indeks Pembangunan manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai t-hitung sebesar -6,203642, yang lebih besar dari t-tabel yaitu 1,984467, serta nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan, sehingga mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian (Salsabila et al., 2025) dimana dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pendidikan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

B. Pengaruh Tingkat pengangguran terhadap kemiskinan

Variabel tingkat pengangguran (TKPE) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,411489, lebih besar dari t-tabel yaitu 1,984467, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0010 ($< 0,05$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini terjadi karena individu yang tidak bekerja tidak memiliki sumber pendapatan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Prabowo & Faridatussalam, 2021) dimana hasil variable Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

C. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap kemiskinan

Variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,963609, yang

lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,984467, serta nilai probabilitas sebesar 0,3377 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dominasi sektor informal, ketidakpatuhan terhadap kebijakan upah minimum, serta tidak meratanya distribusi pendapatan di masyarakat. Hal ini ditemukan juga oleh penelitian (Sembiring et al., 2025) dimana UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera kebijakan UMP perlu dikaji ulang agar lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah.

D. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat kemiskinan

Variabel pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki nilai t-hitung sebesar 1,356087, lebih kecil dari t-tabel yaitu 1,984467, dengan nilai probabilitas sebesar 0,1783 ($> 0,05$). Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif. Artinya, peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin. Temuan ini sejalan dengan (Windari & Imaningsih, 2025) dimana pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan keterkaitan yang positif, namun tidak signifikan secara statistik artinya, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, hal tersebut belum mampu secara langsung menurunkan angka kemiskinan secara menyeluruh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di wilayah yang diteliti menggunakan metode regresi data panel.

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa IPM dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. IPM berpengaruh negatif

dan signifikan, yang berarti peningkatan kualitas pembangunan manusia mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum maupun pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif dan masih terdapat ketimpangan dalam distribusi pendapatan serta akses terhadap kesempatan kerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penurunan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih dipengaruhi oleh kualitas pembangunan manusia dan kondisi ketenagakerjaan.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, upaya penanggulangan kemiskinan di Pulau Sumatera dilakukan dengan pendekatan *Root Cause Analysis (RCA)*, yaitu dengan mengidentifikasi akar permasalahan utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan.

Pemerintah disarankan memprioritaskan kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui pemerataan akses pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan upaya penguatan daya beli masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mengatasi permasalahan pengangguran, pemerintah daerah perlu memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor produktif, khususnya sektor padat karya, serta meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini penting untuk menekan tingkat pengangguran yang terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), pemerintah tidak hanya berfokus pada penetapan besaran upah, tetapi juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap implementasinya serta mendorong perluasan

sektor formal. Dengan demikian, kebijakan upah minimum dapat memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarwilayah. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan serta memperpanjang periode pengamatan guna memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif dan mampu menjelaskan dinamika kemiskinan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2023). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Tirtayasa Ekonomika*, 18(1), 123. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i1.13613>
- Arliansyah, Fuadi, Wardhiah, Pasarela, H., & Juanda, R. (2024). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia : Sebuah Fakta di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 73–79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13314063>
- Barika, B., Ekaputri, R. A., & Hermanto, B. A. (2024). Determinan Kemiskinan Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 13(1), 68-80
- Banito, F. R., Rachmad R, M., & Zulfanetti. (2021). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Journal Development*, 17(1). <https://doi.org/10.53978/jd.v9i1.171>
- Ginting, A. M. (2021). Kemiskinan Di Indonesia Pada Saat Pandemi COVID-19 Poverty In Indonesia In The COVID-19 Pandemic. 26(1), 35–49. <https://www.scribd.com/document/727555834/Kemiskinan-Indonesia-pada-Masa-Covid>
- Imanto, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Pengaruh Pengangguran Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Selatan. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 118. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.636>
- Juniati, J., Junaidi, J., & Achmad, E. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Mankiw. (2018). *Principles of Economics*.
- Mustika, C., Nurjanah, R., & Wulan, S. K. (2023). Determinants of poverty and income inequality on the islands of Sumatra and Java. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1533. <https://doi.org/10.29210/020231686>
- Miftah, S., Arsita, A., Rizkidina, F., Asnidar, A., & Ridha, A. (2024). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 2(1), 89-101.
- Nurafni, H., Rachmad, R. M., & Safri, M. (2021). Analisis determinan kemiskinan dan hubungannya dengan program pengentasannya Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(4), 689–704. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i4.15367>
- Nurkse, R. (1953). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. In *Oxford University Press* (Vol. 10, Issue 1). <https://doi.org/10.2307/2976080>
- Prabowo, B. S., & Faridatussalam, S. R. (2021). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Pulau Sumatera Tahun 2016-2021. 2(4), 1147–1152.
- Purwanti, E. (2024). Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023. 4(1), 1–10.
- Putra, J. A., Yulihar, A. R., Ciptawaty, U., & Suparta, I. W. (2023). Determinan Kemiskinan Pada Sepuluh Provinsi Di Sumatera Tahun 2015-2021. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 495-500.
- Qonita, I. (2020). Pengaruh upah Minimum Terhadap status Perekajaan tenaga Kerja Usia Muda di Jawa Timur. 2.
- Salsabila, D., Yunarti, Y., & Afandi, H. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia , Pengangguran , Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung Tahun 2010-2024. September 2024, 388–406.
- Saragih, R. F., silalahi, P. R., & Tambunan, K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan

- Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007-2021. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(2).
- Sembiring, M., Muntaza, K., Azni, N., & Irfansyah, F. (2025). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM dan UMP terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024. 5(1).
- Sen, A. (1999). *Development As Freedom* (Vol. 2).
<https://sen.scholars.harvard.edu/publications/development-freedom>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development twelfth edition* (Issue November).
<http://libgen.rs/book/index.php?md5=EA124CD3834F823D32E8F2BA6E4129C9>
- Wangi, L. C., Syahidah, S. A., & Sihalo, E. D. (2025). Determinan Kemiskinan Di Sumatera Utara: Studi Kasus 33 Kabupaten/Kota Periode 2020-2022. *Promosi: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 13(1), 172-181.
- Wardani, A. N. K., Pasya, D. J., & Juliono, J. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 14(01), 06–11.
<https://doi.org/10.52657/jiem.v14i01.2045>
- Windari, S., & Imaningsih, N. (2025). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Penanaman Modal Dalam Negeri, Inflasi, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(3), 833–843.
<https://doi.org/10.36985/3qtgjc48>
- Wulandari, D. A., Zulgani, Z., & Achmad, E. (2025). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap ketimpangan Pendapatan di Dalam Provinsi Jambi. 3(11), 513–520.
<https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.7218>
- Yuvanda, S., Rachmad R, M., Yuniarti, T., & Nurkodri, M. S. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Hubungan Dengan Kemiskinan Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Menkeu)*, 14(03), 1228–1236.
- Zainul, H. (2022). *Determinan Kemiskinan Pada 10 Provinsi Di Pulau Sumatera* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).